



LHKPN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA



LHKPN Kepala

Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak



LHKPN Bendahara

Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 195061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 770.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/117 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/70 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 479 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.092.659

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 874.592.659

III. HUTANG Rp. 326.567.735

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 548.024.924



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PRAMITA PUTRI UTAMI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **773704**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.322.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/26 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 132.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 24.150.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 8.806.851**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.487.456.851**

**III. HUTANG****Rp. 903.205.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 584.251.851**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.